

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAMAN HIAS BONSAI DENGAN SISTEM DITITIPKAN KE PENJUAL

(Studi Kasus di Toko Rudyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung
Bintang, Lampung Selatan)



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Pada Ilmu Syariah**

Oleh :

Dhea Danella

NPM : 1521030038

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442/2021 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAMAN HIAS BONSAI DENGAN SISTEM DITITIPKAN KE PENJUAL

(Studi Kasus di Toko Rudyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung
Bintang, Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Pada Ilmu Syariah**

Oleh :

Dhea Danella

NPM : 1521030038

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Pembimbing II: Eti Karini, S.H.,M.Hum.

FAKULTASSYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG

1442/2021 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh banyak manusia, oleh sebab itu banyak manusia yang melakukan jual beli tanpa menerapkan ketentuan – ketentuan syara'. Seperti yang terjadi di toko Bapak Rudyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan yaitu menjual bonsai dengan sistem titipan pada penjual.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli bonsai dengan syarat titipan oleh pembeli kepada penjual dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli bonsai dengan syarat titipan oleh pembeli kepada penjual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli bonsai dengan sistem titipan kepada penjual yang dilakukan di toko Rudyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu menjelaskan secara terperinci tentang jual beli menurut hukum Islam dan melakukan penelitian, sehingga dapat ditemukan Tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli tanaman hias bonsai dengan sistem titipan di toko Rudyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan tentang sah atau tidaknya praktik tersebut menurut hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara. Adapun analisis data secara deduktif dengan menggunakan pendekatan berfikir metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah - kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli tanaman hias bonsai di toko Rudyanto di Desa Sabah Balau, pembeli menitipkan kembali tanaman bonsai yang dibelinya kepada penjual untuk dirawat hingga pembeli tersebut mengambil kembali bonsainya, tetapi dalam perawatan tanaman bonsai tersebut penitip hanya memberi upah untuk jasa penitipan saja sebesar 15-20% dari harga tanaman bonsai yang dititipkan, sedangkan untuk biaya perawatan ditanggung oleh penjual. Biaya perawatan tersebut digunakan untuk membeli peralatan perawatan tanaman bonsai, dan apabila tanaman bonsai yang dirawat itu mati, baik kesalahan oleh perawat atau tidak maka penjual bonsai harus mengganti bonsai tersebut. Menurut Hukum Islam terkait pelaksanaan sistem titipan ini tidak sesuai dengan Hukum Islam khususnya pada ketentuan wadi'ah yad amanah, di mana penjual dibebankan biaya ganti rugi dan biaya perawatan. Hal ini jelas merugikan pihak penjual bonsai sehingga akad penitipan bonsai tersebut tidak diperbolehkan menurut syara' karena tidak mencerminkan keadilan dan melanggar ketentuan Hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea danella
NPM : 1521030038
Jurusan/prodi : MUAMALAH
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai dengan Sistem Dititipkan Ke penjual (Studi Kasus di Toko Rudiyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat penyusunan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Juli 2020

Dhea Danella
NPM.1521030038



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Dhea Danella
NPM : 1521030038
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI TANAMAN HIAS BONSAI
DENGAN SISTEM DITITIPKAN KE
PENJUAL (Studi Kasus di Toko Rudiyanto di
Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung
Bintang, Lampung Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP: 197208262003121002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP: 197308162003122003

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bonsai dengan Sistem Dtitipkan Ke Penjual (Studi Kasus di Toko Rudiyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan).** Disusun oleh: **Dhea Danella, NPM: 1521030038** Progam Studi Muamalah. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Tanggal : 03 November 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

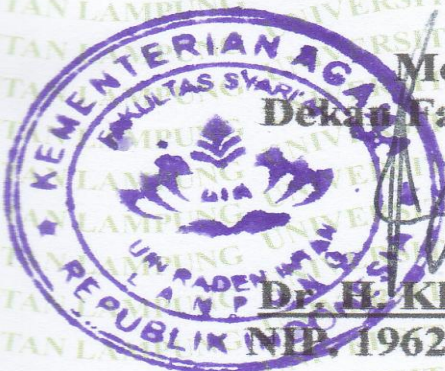
Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

Penguji Utama : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. An-Nisa:58).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur atas keesaan Allah SWT, dengan semua pertolongan-Nya sehingga dapat tercipta karya tulis ini. Maka Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang tercinta dan tersayang yang selalu menjadi motivasi hidup penulis pribadi guna menjadi manusia yang lebih baik, diantaranya :

1. Keduaorang tua Bapak Hasan Bisri dan Ibu Aminah yang senantiasa penulis cintai dan banggakan yang selama ini juga telah mendidik, membimbing, serta memberikan motivasi baik moril maupun materil dan tak pernah lupa selalu memberikan doa yang tiada henti-henti nya kepada diri penulis agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak kedepannya.
2. Adik-adikku tercinta Dhienda Adellia dan Hafidz Asska Al Fatih, yang selalu memberi semangat dan motivasi serta keceriaan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Untuk Riki Agus Saputra terima kasih atas semangat, dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dhea Danella, putri pertama dari Bapak Hasan Bisri dan Ibu Aminah. Lahir di Baradatu, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 08 November 1997.

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Al-Qudus Bumi Ratu, Way Kanan pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Bumi Ratu, Way Kanan pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baradatu, Way kanan pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baradatu, Way Kanan pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014.
5. Pada tahun 2015 melanjutkan jenjang Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bonsai dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staff dan jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberiar ahan serta masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta Civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan seluruh pihak akademis yang telah melayani dalam hal administrasi dan lainnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2020

Penulis

Dhea Danella
1521030038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Signifikan Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kajian Teori	15
1. Akad.....	15
a. Pengertian Akad dalam Islam.....	15
b. Dasar Hukum Akad	16
c. Rukun Akad.....	18

d. Syarat Syarat Akad.....	30
e. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad	31
f. Macam-macam Akad	34
2. Jual Beli	37
a. Pengertian Jual Beli Menurut Islam	37
b. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam	39
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	40
3. Wadi'ah.....	45
a. Pengertian Wadi'ah.....	45
b. Dasar Hukum Wadi'ah.....	46
c. Rukun dan Syarat Wadi'ah	48
d. Hukum Menerima Benda Titipan.....	50
e. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan.....	51
B. Tinjauan Pustaka.....	52
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1. Sejarah Singkat Desa Sabah Balau Tanjung Bintang	58
2. Kondisi Geografis.....	60
3. Potensi Desa.....	60
B. Praktik Jual Beli Bonsai Dengan Syarat Titipan ke Penjual di Desa Sabah Balau Tanjung Bintang	69
1. Latar Belakang dan Penyebab Pembeli Bonsai Menitipkan Kepenjual di Desa Saba Balau	69
2. Jasa Jual Beli dan Penitipan Bonsai kePenjual	71
BAB IV ANALISIS DATA.....	75
A. Praktek Jual Beli dengan Sistem Penitipan Bonsai di Desa Saba Balau	75
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bonsai dengan Syarat Titipan Oleh Pembeli Kepada Penjual di Desa Sabah Balau.....	81
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Sabah Balau Menurut Usia	63
2. Jumlah penduduk desa Sabah Balau menurut pekerjaan.....	64
3. Jumlah penduduk desa Sabah Balau berdasarkan tingkat pendidikannya	66
4. Jumlah Suku Bangsa di Desa Sabah Balau	67
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sabah Balau.....	67
6. Jumlah B angunan Infrastruktur di Desa Sabah Balau.....	68
7. Jumlah Penduduk Desa Sabah Balau dalam Keterlibatan di Organisasi Sosial	70
8. Daftar Nama Pembeli Yang Menitipkan Bonsai di Desa Saba Balau di Kecamatan Tanjung Bintang dan Jati Agung Lampung Selatan.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal. Adapun judulnya adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai Dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual” (Studi Kasus di Toko Rudyanto di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan). Maka perlu dijelaskan maksud judul tersebut.

1. Tinjauan adalah hasil peninjauan pandangan, pendapat, (masalah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.²
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12.

³ H.A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

4. Tanaman Bonsai adalah pohon yang dikerdilkan dan biasanya dapat ditanaman dalam sebuah pot tanaman.⁴
5. Wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di jelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai Dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai Dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual”

adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Jual beli merupakan aktifitas yang dilakukan dimasyarakat setiap harinya, apa lagi jual beli bonsai sudah terbiasa yang dilakukan dimasyarakat. Namun jual beli bonsai dengan sistem titipkan kepenjual yang terjadi dimasyarakat, disini peneliti mau meneliti yang dilakukan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1381.

⁵ Siti Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), cet. 4. h. 254.

dimasyarakat tentang jual beli bonsai dengan sistem titipkan kepenjual ini sudah sesuai apa tidak rukun dan syaratnya jual beli dalam hukum Islam.

- b. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti karena agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok pembahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di fakultas Syari'ah jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Tersedia literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan sesuatu kegiatan apapun atau kegiatan perekonomian dan perniagaan tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain, dengan kata lain melakukan suatu kegiatan usaha seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang yang ahli agar usaha yang dikelola berjalan sesuai yang diharapkan.

Mu'amalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dan alam sekitarnya atau alam semesta.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada orang lain, saling bertolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan

kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, kerja sama maupun berserikat. Manusia mempunyai kepentingan-kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai tujuan yang sama.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali masalah-masalah yang timbul antara orang satu dengan orang yang lain dalam melakukan suatu perikatan sebuah manfaat bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut, dalam jual beli yang harus di utamakan dalam sebuah kegiatan antara penjual dengan pembeli. Jual beli adalah salah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu dengan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara dan disepakati baik dari segi syarat maupun rukunnya.⁶

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).⁷

Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grefindo Persada, 2002), h. 68.

⁷Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 48

mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (1473-1474 KUHP).⁸

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (1513-1514 KUHP).⁹

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minum misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga memungkinkan besar akan berbentuk akad jual beli.¹⁰

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual (gharar) terdapat unsur penipuan, jika rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual tersebut tidak sah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 telah diatur tentang masalah prinsip-prinsip transaksi jual beli tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 369.

⁹ *Ibid.*, h. 375.

¹⁰ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Muamalah*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010), h. 69.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 tentang wadihah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan hukun di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat.”

Berdasarkan syariat Islam maka dalam jual beli bonsai terdapat permasalahan yang timbul. Dalam jual beli tanaman bonsai di desa sabah balau terdapat sistem titip yang dilakukan oleh pembeli ke penjual, dimana dalam sistem titip tersebut terdapat permasalahan yang timbul dalam perawatan, pembeli hanya memberikan uang jasa titip saja kepada penjual sebesar 15-20% dari harga tanaman bonsai yang dititipkan tetapi penitip tidak memberikan biaya perawatan dan biaya perawatan ditanggung seluruhnya oleh perawat atau penjual bonsai. Apabila tanaman bonsai yang dirawat penjual mati baik kesalahan yang ditimbulkan oleh perawat bonsai maupun tidak maka perawat bonsai atau penjual bonsai harus mengganti bonsai tersebut seharga bonsai yang telah mati.

Hal ini tidak dibenarkan berdasarkan Hukum Islam karena merugikan pihak penjual bonsai karena tidak mencerminkan keadilan dan ketentuan Hukum Islam. Seharusnya pihak penitip memberikan biaya perawatan untuk merawat tanaman bonsai yang dititipkan sehingga penjual tidak terbebani dalam perawatan tanaman bonsai. Selain itu sistem titipan bonsai ini tidak sesuai dengan akad wadi'ah yad amanah, dimana barang yang dititipkan oleh pihak penitip kepada yang menerima titipan untuk tidak mempergunakan barang titipan tersebut, hanya diperbolehkan untuk menjaganya saja sampai barang titipan tersebut diambil kembali oleh penitip. Dan yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang tersebut selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada ketentuan tentang jual beli bonsai dengan sistem titipan ke penjual serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli bonsai dengan sistem titipan kepenjual.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bonsai Dengan Syarat Titipan Oleh Pembeli Kepada Penjual di Desa Sabah Balau?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bonsai Dengan Syarat Titipan Oleh Pembeli Kepada Penjual di Desa Sabah Balau?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli bonsai dengan sistem titipan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli bonsai dengan syarat titipan oleh pembeli kepada penjual.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dalam ilmu pengetahuan mengenai jual beli bonsai di masyarakat dan serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek jual beli sesuai hukum Islam.
- b. Peneliti ini berguna untuk menambah referensi yang melakukan penelitian yang akan datang dan diharapkan bisa bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, saudara, teman, dan agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari syari'at hukum Islam.

G. Signifikan Penelitian

Adapun signifikan atau kegunaan dapat diklarifikasi sebagai berikut :

1. Signifikansi dari Segi Teori

Peneliti menjelaskan signifikansi atau suatu manfaat yang diharapkan dari hasil akhir peneliti untuk dapat memperkaya teori konsep tinjauan hukum islam tentang jual beli bonsai dengan sistem titipan kepenjual.

2. Signifikasi dari Segi Praktik

Peneliti ini diharapkan memberikan masukan mengenai hukum Islam terhadap jual beli bonsai dengan sistem titipan kepada penjual.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan responden dan metode ini lebih menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.¹¹

b. Sifat meneliti

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Pengertian penelitian deskriptif adalah peniliti yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan apa adanya dalam hal ini tentang tinjauan hukum Islam tentang ganti rugi barang yang dititipkan.

¹¹Susiadi As, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam peneliti ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹² Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada dua yakni :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada responden sebagian sumber informasi yang dicari.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu. Jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang perusahaan, lembaga, media dan lainnya.¹³

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115-116.

¹³ Susiadi As, *Op, Cit.*, h. 81.

b. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian sampel yang digunakan *non-probability sampling* yaitu penelitian lebih bergantung pada kemampuan dan batasan peneliti dalam menarik sampel.¹⁵ Teknik *non-probability sampling* yang digunakan adalah jenis *purposive sampling* yakni dengan menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti memiliki batasan sampel pembeli yang hanya membeli tanaman bonsai dan akan menitipkan bonsai yang telah dibeli, serta penjual tanaman bonsai di toko tersebut. Didapati sebanyak 9 orang pembeli tanaman bonsai yang akan menitipkan tanaman bonsainya dan 1 orang penjual tanaman bonsai sebagai sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan.¹⁶ Observasi yang dilakukan pada peneliti ini adalah dengan mengamati para pihak melakukan jual beli bonsai yang dilakukan masyarakat di Desa Sabah Balau.

¹⁴Suharsimin Arikunto, *Op. Cit.*, h. 104.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Etodologi Research I*, (Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980), h.

¹⁶*Ibid*, h, 74.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cari data mengenai hal-hal suatu yang berkaitan dengan masalah variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, rapat, catatan khusus dalam pekerjaan soal dan dokumen lainnya.¹⁷ Pelaksanaan dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan jual beli bonsai dengan sistem titipkan kepenjual.

5. Metode pengelola data

Pengelola data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam peneliti. Pengelola data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing data yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian sarta relevansinya dengan data lain.
- b. Sistematisasi data yaitu kegiatan manubulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan di beri tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi rangka-rangka dan presentase apabila data itu kuantitatif,

¹⁷Susiadi As, *Op, Cit.*, h. 115.

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif penyusun data memudahkan analisis data.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹

Terdapat dua metode secara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisa data, sebagai berikut. Metode deduktif adalah menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah dan fenomena yang bersifat umum. Berkaitan dengan proposal ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku Fiqih, Tafsir, Al-Quran dan Hadist, dan bersumber lainnya. Metode induktif adalah menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian.

¹⁸ Abdul Kadir dan muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung : Mitra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 334.

Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰



²⁰Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, h. 28

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad dalam Islam

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya seperti penggalan dalam firman Allah surat *Al-Māidah* (5) ayat 1 sebagai berikut:



Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aḥdu* dalam bentuk jamak di-sebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qobūl* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²² Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan dalam *ijāb*

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.141.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.44.

qobūl, Kesesuaian dengan kehendak syariah, adanya akibat hukum pada objek perikatan.²³

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, gadai.²⁴

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijāb* (pernyataan penawaran atau pemindahan hak kepemilikan) dan *qobūl* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁶

b. Dasar Hukum Akad

Prinsip dasar “akad” adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini tergantung dari segi lazim (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat lazim, maka berkewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akad

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group), h.71.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Presss, 2017), h.35.

²⁶ *Ibid.*, h.72.

yang bersifat *jaiz*, hanya sebatas disunnahkan saja, karena termasuk kebajikan yang dianjurkan syara'.²⁷

Berikut ini adalah dalil-dalil akad yang bersumber dari Al-Qur'an dalam Q.S *Al- isrā* (17) ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah *kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*”.²⁸

Penggalan Q.S *Al-Baqarah* (2) ayat 177:

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

Artinya: “...Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji...”.²⁹

Penggalan Q.S *Al-Māidah* (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.7.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.285.

²⁹ *Ibid.*, h.27.

Artinya: “..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³⁰

Dasar hukum akad berdasarkan hadist:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ : مع النبيين و الصديقين و الشهداء – يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasuluillah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).” (HR. Ibnu Majah).³¹

c. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan, keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajibanyang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:³²

- a. ‘*Āqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang,

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.106.

³¹HR Ibnu Majah No. 2139, al-Hakim No. 2142 dan ad-Daraquthni no. 17, dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadist lain yang menguatkannya, dari Abu Sa’id al-Khudri radhiaallahu ‘anhu, HR at-Tirmidzi No. 1290 dan lain-lain. Oleh karena itu hadits dinyatakan baik sanadnya oleh Imam adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani (lihat ash-Shalihah No. 3453).

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.47.

mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki orang yang memiliki hak dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. *Ījāb* dan *qābul* yang oleh hanafiah dipandang sebagai satu satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad, dialah pelaku dari setiap transaksi.

Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad.

Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun mewakili orang lain. Dengan demikian, ada dua hal yang perlu di bahas berkaitan dengan rukun akad yang pertama, yakni '*āqid*', yaitu:

1. *Ahliyyāh* (kecakapan)
2. *Wilāyah* (kekuasaan)
- 1) *Ahliyyāh* (kecakapan)

Ahliyyāh atau kecakapan terbagi kepada dua bagian, yaitu *ahliyyāhal-wujūb* dan *ahliyyāh al-ada'* *Ahliyyāh al-wujūb* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Sedangkan *ahliyyāh al-ada'* adalah kecakapan seseorang

melaksanakan hak dan kewajiban. Secara global orang yang memiliki *ahliyyāh al-ada'* adalah orang yang baligh dan berakal serta terbebas dari '*awālīd ahliyyāh* atau penghalang kecakapan.

2) *Wilāyah* (kekuasaan)

a) Pengertian *Wilāyah*

Wilāyah dalam arti bahasa adalah “menguasai persoalan dan melaksanakannya”.³³

Menurut istilah syara', pengertian wilayah itu adalah “suatu kekuasaan yang diberikan oleh syara' yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan tasarruf dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya”.³⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Wilāyah* adalah kekuasaan yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad, kecakapan (*ahliyyāh al-ada'*-nya) tidak sempurna, misalnya masih dibawah umur. Perbedaanya dengan *ahliyyāh al-ada'* adalah, *ahliyyāh al-ada'* merupakan syarat untuk sahnya akad. Apabila ada *ahliyyāh al-ada'* tidak ada maka akad

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.116.

³⁴ *Ibid.*,

menjadi batal. Sedangkan *wilāyah* (kekuasaan) merupakan syarat untuk kelangsungan akad dan timbulnya akibat-akibat hukum. Syaratnya harus memiliki *ahliyyāhal-ada'*. Apabila *ahliyyāhal-ada'*-nya tidak sempurna, maka tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dengan memandang kepada hubungan antara *ahliyyāh* dan *wilāyah* maka hukum akad itu ada tiga macam:³⁵

(1) Apabila orang yang melakukan akad kecakapannya sempurna dan mempunyai *wilāyah* (kekuasaan), maka akadnya sah dan dapat dilangsungkan, kecuali apabila di dalamnya ada kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini orang yang merasa dirugikan tersebut bisa meluluskan atau menghalanginya, sehingga akadnya ditangguhkan.

(2) Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki *ahliyyāh* sama sekali dan memiliki *wilāyah* (kekuasaan) maka akad akan menjadi batal, seperti akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum *mumayyiz*. Apabila akad itu dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyyāhal-ada' nāqishah* (tidak sempurna), seperti anak *mumayyiz*, maka akadnya sah apabila menguntungkan 100%, dan batal apabila merugikan 100%, serta (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali,

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.115.

apabila akadnya itu mungkin menguntungkan dan mungkin merugikan.

- (3) Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyyāhal-ada'* sempurna, tetapi tidak memiliki *Wilāyah* (kekuasaan) untuk melakukan transaksi, maka adanya itu disebut akad *fudhūli*, dan hukum akadnya ditangguhkan menunggu persetujuan dari orang yang memiliki barang.

b) Macam-macam *Wilāyah* (kekuasaan)

Wilāyah (kekuasaan) terbagi kepada dua bagian:

- (1) Asli, dalam arti seseorang mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad bagi dirinya, karena memiliki kecakapan sempurna;

- (2) Perwakilan, dalam arti seseorang mendapat kekuasaan untuk mengurus kepentingan orang lain, *Wilāyah* perwakilan terbagi kepada dua bagian:

- (a) *Ikhtiyāriyah*, yaitu suatu pemberian kekuasaan untuk melakukan *tasharruf* atas nama orang lain dengan sukarela.

- (b) *Ijbāriyah*, yaitu suatu pemberian kekuasaan oleh syara' atau pengadilan untuk melakukan usahaguna kemaslahatan orang yang berada dibawah pengampuan, seperti kekuasaan seorang ayah, kakek, atau pemegang wasiat terhadap anak

dibawah umur, dan kekuasaan hakim atas anak yang berada dibawah pengampuan. Dalam contoh ini sumber kekuasaan dari ayah, kakek, atau hakim adalah syarat, sedangkan sumber kekuasaan pemegang wasiat adakalanya atas pemilihan oleh ayah atau kakek, atau karena pernyataan hakim.

- b. *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan atau objek akad, objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat ibadah harta, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan, dan adakalanya bukan ibadah harta, seperti perempuan dalam akad nikah, dan adakalanya berupa manfaat, seperti benda yang disewakan.³⁶

Dalam kenyataan ini tidak semua benda bisa dijadikan objek akad. Hewan babi misalnya bagi muslim tidak bisa dijadikan objek akad, karena bukan harta yang boleh diambil manfa'atnya. Perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan nasab atau susuan tidak bisa dijadikan objek akad nikah. Benda-benda yang dibolehkan untuk dijadikan objek akad adalah benda-benda yang memenuhi syarat.³⁷

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.118.

³⁷*Ibid.*, h.119

Para *fuqaha*, sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili, mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad antara lain:³⁸

1. Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad. Apabila benda tersebut tidak ada pada waktu akad maka akadnya tidak sah, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan induknya karena mungkin lahir dalam keadaan mati, atau buah durian sebelum muncul (*keliatan*) karena kemungkinan tidak berbuah. Syarat ini berlaku dikalangan Hanafiah dan Syafi'iyah, baik adanya itu akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) maupun akad *tabarrū'*. Akan tetapi, mereka mengecualikan dari ketentuan umum ini untuk akad *salam* (pesanan), *ijarāh*, *musāqoh*, dan *istishna*. Dalam akad-akad ini meskipun barangnya belum ada, hukumnya tetap sah dengan berpegang kepada *istishna*, karena akad-akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia.³⁹

Malikiyah mencukupkan syarat yang pertama ini hanya dalam akad *mu'awadhah*, sedangkan untuk akad-akad *tabarru'* seperti hibah dan wakaf, syarat ini tidak diperlukan, yang penting barang tersebut mungkin akan ada pada masa datang. Sedangkan Hanabilah tidak mensyaratkan hal ini. Mereka melarang melakukan akad terhadap barang-barang yang mengandung penipuan, seperti menjual anak sapi yang masih

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), h.102.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.128.

dalam rahim induknya. Jadi, Hanabilah menitik beratkan syarat ini pada adanya unsur penipuan, bukan ada atau tidak adanya barang.⁴⁰

2. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara', yang dalam istilah fiqh muamalat disebut *māl mutaqāwwim*. Apabila objek akadnya bukan *māl mutaqāwwim*, maka akadnya batal. Contoh *māl ghāir mutaqāwwim* seperti babi, bangkai dan minuman keras. Demikian pula apabila objek akadnya itu benda-benda mubah yang belum dimiliki, seperti burung yang masih berterbangan di udara, ikan di dalam air laut, dan kijang di hutan belukar.

3. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad. Apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan pada waktu akad, maka akad ini menjadi batal. Syarat ini menurut kesepakatan *fuqaha* berlaku dalam akad-akad *mu'awadhāh*, dan menurut Imam Malik memperbolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarrū'*. Namun, Imam Malik memperbolehkan dijadikan objek akad dalam akad tabarru' terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.

4. Barang yang dijadikan objek akad haruslah jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan

⁴⁰*Ibid.*, h.129.

antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui, maka *tasharruf* menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukan barangnya apabila barang ada di tempat akad, dengan dilihat, atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut. Syarat ini menurut kesepakatan fuqaha berlaku dalam akad *mu'awadhāh maliyāh*. Adapun untuk akad *ghāir mu'awadhāh*, maka para ulama berbeda pendapat, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan juga di dalam akad *mu'awadhāh ghāir maliyāh* seperti akad nikah, dan akad *tabarrū'*, seperti hibah dan wakaf. Hanafiah tidak mensyaratkan dalam akad *tabarrū'* seperti wasiat dan *kafalah*. Malikiyah hanya mensyaratkan di dalam akad *mu'awadhāh maliyāh*, sedangkan untuk akad *mu'awadhāh ghāir maliyāh* dan akad *tabarrū'* tidak mensyaratkannya.

5. Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutānajis*. Syarat yang kelima ini dikemukakan oleh jumhur ulama selain Hanafiah. Dengan demikian, barang-barang yang tidak suci atau najis dan tercampur najis tidak sah dijadikan objek akad. Contoh benda yang najis seperti anjing, babi dan darah. Contoh *mutānajis* seperti susu benda-benda yang diperselisihkan najisnya untuk dijadikan objek akad, seperti burung bulbul yang didengarkan suaranya, bukan dimaksudkan dagingnya. Akan tetapi, kelompok Hanafiah tidak

mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, mereka memperbolehkan menjual jenis barang yang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai untuk dimanfaatkan, kecuali benda-benda yang jelas dilarang, seperti bangkai dan darah. Pedoman yang digunakan oleh Hanafiah adalah setiap benda yang manfaatnya halal menurut syara' maka benda tersebut boleh dijual, karena benda diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Baqarah* (2) ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴¹

- c. *Maudhū' al-‘āqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*‘iwādh*).

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h

d. *Shighat al-‘āqd* ialah *ījāb* dan *qabūl*, *ījāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ījāb*.

Hal hal yang harus di perhatikan dalam *shīghat al-‘āqd* ialah:⁴²

1. *Shīghat al-‘āqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ījābqabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.
2. Harus bersesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan *qabūl* berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ījāb* dan *qabūl* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.

⁴² Sohari Ru’fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42.

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.⁴³

a. Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua ‘*āqid* berjauhan tempatnya, maka *ijāb* dan *qabūl* dengan cara *kitābah*.

b. *isyārat*, bagi orang-orang tertentu akad atau *ijāb* dan *qabūl* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijāb qabūl* dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan *ijāb* dan *qabūl* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, *qabūl* atau akad dilakukan dengan isyarat.

c. *Ta’āthi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seseorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.48-49.

pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”. Proses seperti ini dinamakan *ta'āthi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

- d. *Lisān al hāl*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan jalan *dalālat al-hāl*.

d. Syarat Syarat Akad

Setiap pembentukan *'āqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, Syarat-syarat yang bersifat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.

⁴⁴ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan 'āqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulāsamah*.⁴⁵
- e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila *rāhn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. *ījāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g. *ījāb* dan *qabūl* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka *ījāb* tersebut menjadi batal.

e. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain.⁴⁶

⁴⁵Jual beli *mulasamah* adalah jual beli yang dimana pembeli jika menyentuh barang jualan seseorang itu artinya dia harus membeli dan jual beli ini dilarang syara' (<https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulasamah-jual-beli-munabadzah-jual-beli-hashah-jual-beli-muhaqalah-html>)

⁴⁶Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 39.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh dalam suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak atau perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. *Al-Hūrriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*); baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. *Al-Musāwāh* (Kesetaraan)

Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

c. *Al-‘Adālah* (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi

⁴⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.21.

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. *Ar-Ridhā* (Kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

e. *Ash-Shiddiq* (Kejujuran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. *Al-kitābah* (Tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan *kitābah* (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Selain itu perlu ada pihak saksi, *rāhn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:⁴⁸

1. *Ījāb* dan *Qabūl*. *Ījāb qabūl* harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. *ījāb qabūl* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.

⁴⁸*Ibid.*, h.27.

2. Pelaku Kontrak. Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.
3. Objek akad. Objek kontrak secara umum harus ada atau terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli *salam*, *istishnā'*, dan *ijārah*, karena pertimbangan maslahat dan telah menjadi *'ūrf*.
4. Akibat hukum kontrak. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

f. **Macam-macam Akad**

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya, hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara'. Maka akad dibagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.⁴⁹ Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:

a. Akad *Shahīh*

Akad *Shahīh* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), h.231.

akibat hukum yang ditimbulkan akad-akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *Nāfīz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Maūqūf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

b. Akad Tidak *Shahīh*

Akad tidak *Shahīh* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: akad *bāthil* dan akad *fāsid*. Suatu akad dikatakan *bāthil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad *fāsid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

1. 'Akad *Mūnjiz*

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah

pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.⁵⁰

2. *'Akad Mu'ālaq*

Adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

3. *'Akad Mudhāf*

Adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penangguhan pelaksanaan akad pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.

g. Berakhirnya Akad

Akad berakhir apabila:⁵¹

- Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.50-51.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo), h.35.

satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyār syarat*, *khiyār aib*, atau *khiyār ruqyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli Menurut Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵²

Jual beli menurut bahasa (etimologi) yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Faathir (35): 29 yaitu sebagai berikut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak rugi”.⁵³

Beberapa pengertian jual beli menurut para ulama, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan yaitu saling melepaskan hak milik dari yang satu

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.437.

kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).⁵⁴

b. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam

Jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai dan landasan yang kuat dalam Al-Quran.⁵⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (berserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".⁵⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga menolak argumen kaum musyrikin (kafir) yang menentang di terapkannya syariat jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum

⁵⁴ H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet publishing, 2016), h.104.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.68.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.47.

musyrikin (kafir) tidak mau mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan ribawi, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*.⁵⁷

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi yang bersifat riba (bunga), transaksi yang bersifat tidak menentu (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.83.

penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁵⁸

Rukun (unsur) jual beli terdiri atas:⁵⁹

1. Penjual, ialah orang yang mempunyai harta dan menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
2. Pembeli, adalah orang yang cakap yang membelanjakan hartanya (uangnya).
3. Barang jualan, adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Sighat, (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli memberikan uangnya dan pihak penjual menyerahkan barang jualannya (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang tersebut lisan ataupun tulisan.

Menurut ulama fiqh bahwa syarat sahnya orang yang melakukan akad jual beli harus sebagai berikut:⁶⁰

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berakal, yaitu dapat membedakan antara baik dan buruk atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila

⁵⁸ H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op.Cit.*, h.103.

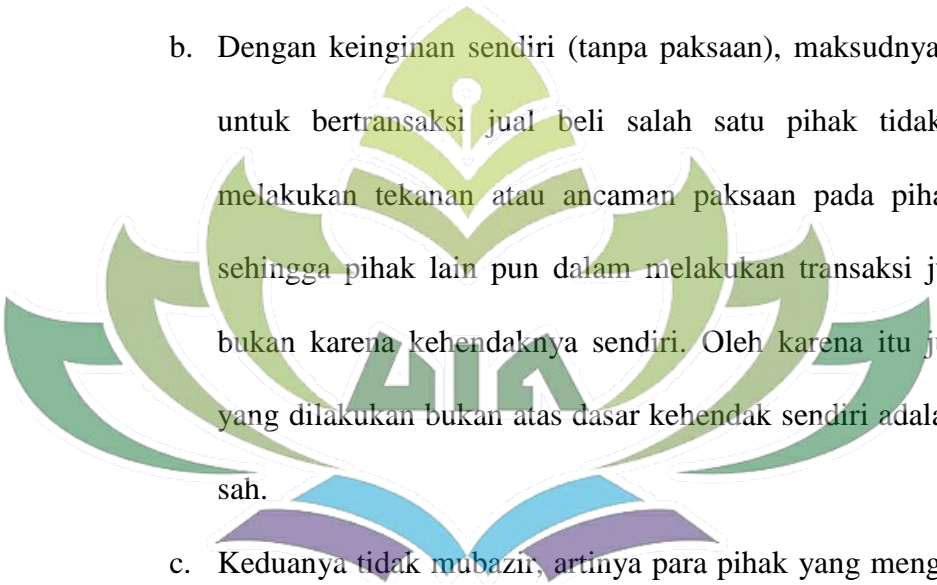
⁵⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.168.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah, Op.Cit.*, h.70-71.

salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nissa' (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: *"Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh"*.⁶¹

- 
- b. Dengan keinginan sendiri (tanpa paksaan), maksudnya adalah untuk bertransaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau ancaman paksaan pada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- c. Keduanya tidak mubazir, artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros dimata hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya ialah tidak dapat melakukan kegiatan hukum sendiri perbuatan meskipun hukum tersebut menyangkut keperluan pribadi.
- d. Baligh, dalam hukum islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.77.

datang bulan (haid) bagi anak perempuan, artinya transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidaklah sah tetapi bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang nilai nominalnya kecil dan tidak bernilai tinggi.

2. Objek jual beli, ialah barang atau benda yang menjadi sebab akibat transaksi jual beli, ketentuan barang atau benda untuk memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- b. Benda yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, maksudnya adalah barang yang terdapat manfaat tentunya sangat bervariasi, karena pada umumnya barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang-barang yang dapat diambil manfaatnya untuk dikonsumsi ataupun di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Barang atau benda yang diperjualbelikan harus kepunyaan orang yang akan melaksanakan akad, artinya orang yang

melaksanakan akad jual beli atas barang tersebut adalah pemilik sah atau telah memiliki izin atas barang tersebut dari pemilik sah.

d. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diberikan, maksudnya adalah barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diberikan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

e. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diperlihatkan artinya barang atau benda yang akan diperjualkan dapat diketahui kondisi, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli mengandung penipuan.

f. Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dapat dikembalikan, artinya barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dapat dikaitkan atau digantungkan kepada yang lain.

3. Berakal, Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyis* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal, apabila orang yang berakad *mumayyis*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun pendapat izin dari walinya.

4. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁶²

3. Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*,⁶³ Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁶⁴

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi'ah*, menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi*

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid III (Jakarta: Pustaka Pelajar 2011), h.129.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.85.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), h.3.

Layahfadzahu). Berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan makna yang kedua dari *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima seperti seseorang berkata “*awda'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'indi*). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*).⁶⁵

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemiliknya meminta kembali,⁶⁶ diantara landasan hukum yang bersumber pada *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S An-Nissa' (4) ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.⁶⁷

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

⁶⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arabah*, tahun 1969, h.248.

⁶⁶ Hendi Suhendi, h.182

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.81

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

b. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsekuensi) terhadap legitimasi *wadi’ah* karena kebutuhan manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah*, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan)⁶⁹.

c. Ketentuan Dewan Syariah Nasional

Dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi’ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.91

⁶⁹ Karnean A, Perataatmadja da Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Bhaki Wakaf, 1992), h.17-19.

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* menurut Hanafiah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya meminta anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *al-wadi'ah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi'*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah atau muwada'*), dan sighat (*ijab dan kabul*).⁷⁰ Sedangkan syarat-syarat *al-wadi'ah* adalah:

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum baligh,⁷¹ maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan *wadi'ah*, tidak disyaratkan baligh maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga barang titipan. Begitu juga dengan menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara barang titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama

⁷⁰

⁷¹ Ali Haidir, *Durar al Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 2001), h.229.

dengan apa yang disyaratkan dengan *wakalah* berupa baligh, berakal dan cerdas.

b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara.⁷² Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*.

c. *Sighat* (ijab dan kabul), seperti saya menitipkan “saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafaz kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. Diamnya sama dengan kabul sebagaimana sama dengan *mu'athah* pada jual-beli.

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki sesuai syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan yang menerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.
- c. *Sighat* ijab dan qabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab dan kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

⁷²*Ibid*, h.39.

d. Hukum Menerima Benda Titipan

Menurut Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam , yaitu sunah, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:⁷³

- a. Sunah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya bagi dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah, hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h.183-184.

kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

e. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Tamiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Tamiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan, milik orang lain, ternyata barang tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan

tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan itu ditulis oleh dirinya sendiri.

Apabila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan wajar, namun tidak diperoleh keterangan dengan jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai Dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual” sebelumnya belum pernah ada dan belum pernah dilakukan untuk diteliti. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan permasalahan jual beli tanaman hias bonsai dengan sistem dititipkan ke penjual dengan skripsi-skripsi penelitian terdahulu, dapat dilihat dari pokok permasalahan terlebih dahulu, berikut penjelasannya:

- a. Arman Saibani (2018) dari Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Pada penelitian yang dilakukan mengangkat masalah bagaimana praktek jual beli pohon karet dengan

sistem tangguh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pohon karet dalam sistem tangguh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang di analisa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa jual beli pohon karet dengan sistem tangguh sudah menjadi tradisi dimana dalam transaksi jual beli pohon karet hanya menggunakan kwitansi pembeli bahkan ada yang hanya dengan lisan. Selain itu, terdapat unsur kerugian dari salah satu pihak dan tidak adanya kejelasan terhadap ukuran dan waktu penangguhan secara pasti. Ditambah lagi transaksi jual beli pohon karet dimungkinkan adanya terjadi kerusakan atau kekurangan pada barang ataupun kerusakan yang terjadi disekitar penebangan pohon karet tersebut. Menurut pandangan hukum Islam dapat dipahami bahwa, pelaksanaan jual-beli pohon karet dengan sistem tangguh yang terjadi di Desa Tunggal Warga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah dalam islam. Oleh karena itu, praktek jual beli ini sudah seharusnya dihindari menurut hukum Islam.⁷⁴

- b. Nurul Wakhidah (2008) dari Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Toko “Eny’s Green” Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Pada penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana jual beli tanaman hias menurut tinjauan hukum islam. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian

⁷⁴ Arman Saibani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

ini menggunakan metode wawancara dan analisis data secara deskriptif. Setelah dilakukan penelitian terhadap pembahasan jual beli tanaman hias dalam tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis data maka hasil dari penelitian tersebut menyatakan dibolehkannya jual beli tanaman hias yang dilakukan oleh Eny's Green , karena praktik jual belinya sudah sesuai dengan ajaran Islam yang baik mengenai syarat dan rukun jual beli baik dari segi transaksi maupun dengan harganya dan mendatangkan manfaat bagi penjual dan pembeli.⁷⁵

- c. Muhammad Iqbal (2009) dari Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium Di Pasar Pon Godean Sleman. Pada penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana praktik jual bibit Anthurium di pasar Godean Sleman Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli bibit tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jual bibit anthurium di pasar pon Godean apabila dilihat dan dianalisis dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis, maka jual beli bibit anthurium untuk umur kurang lebih 3 bulan termasuk *garar*, karena pada umur tersebut bibit anthurium belum menampakan

⁷⁵ Nurul Wakhidah, *Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

karakter asli indukannya di mana menurut hukum Islam jual beli tersebut dilarang.⁷⁶

- d. Meilita (2018) dari Fakultas Muamalah, universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *Praktek Jual Beli Barang Dengan System Panjar Titip Dalam Prespektif Hukum Islam*. Pada penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip di Toko Risky Jaya Simpang Asam Banjit, Way Kanan dan bagaimana prespektif hukum islam tentang praktek jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif analisis sumber daya primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip dengan cara si pembeli memanjar uang yang ditentukan 50% dari jumlah keseluruhan, lalu dititipkan di toko tersebut, kemudian jika harga sudah naik si pembeli ini mengambil barangnya dan barang tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan harga yang sudah naik. Tetapi pemilik toko tersebut tidak mengetahuinya jika akan diperjualbelikan. Setelah diperjualbelikan pembeli ini melunasi barang tersebut dengan harga masih rendah atau seperti awal membelinya. Ditinjau dari prespektif hukum Islam ini, tidak diperbolehkan, karena adanya ketidakjelasan dalam berakad menimbulkan unsur penipuan dan kemafaatan harta secara batil.⁷⁷

⁷⁶Muhammad Iqbal, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

⁷⁷ Meilita, *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

e. Elisa (2018) dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli *online*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini bahwa pada dasarnya jasa titip diperbolehkan dalam hukum Islam. Pada kenyataannya terdapat berbagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh jasa titip, berawal dari legalitas jual beli dengan tidak adanya kontrak atau perjanjian yang mengikat antara jasa titip dan penjual sehingga dapat menimbulkan permainan harga yang diambil oleh jasa titip sebagai upah lain diluar dari upah sebagai jasa dan berbagai macam kecurangan lainnya oleh jasa titip sehingga tidak dipenuhinya rukun dan syarat dari *samsarah*, akad jual beli menjadi batal. Dapat disimpulkan dalam praktik jasa titip pada jual beli *online* ini menjadi tidak sah.⁷⁸

Berdasarkan penelitian yang terdahulu di atas, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari fokus penelitian yang difokuskan pada ketentuan jual beli bonsai dengan sistem dititipkan ke penjual dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya, maupun tempat atau obyek studi yang dipilih.

⁷⁸ Elisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan dan perbedaan. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di atas ialah penelitian ini sama sama membahas tentang jual beli sedangkan perbedaannya ialah pertama, lokasi tempat penelitian yang penulis teliti bertempat di Desa Sabah Balau kec. Tanjung Bintang. Kedua, fokus penelitian yang penulis teliti ialah ketentuan jual beli bonsai dengan sistem dititipkan ke penjual dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanaman hias bonsai dengan sistem dititipkan ke penjual. Ketiga, permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian terdahulu yang pernah diteliti atau yang penulis jadikan referensi. Di mana permasalahan di skripsi penulis ini yaitu dalam jual beli tanaman hias bonsai di Desa Sabah Balau terdapat sistem titip yang dilakukan oleh pembeli ke penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Muhammad Kadir, *Hukum dan Peneliti Hukum*, Bandung : PT Citra Adityabakti, 2004.
- Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-kubra, Juz 2, Kairo, Mauqi.
- Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalni, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist*
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arabah*, tahun 1969,
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teorike Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Presss, 2017.
- As Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung :Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami WaAdilatuh*, Juz. 5, Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami WaAdilatuhu* Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid5 Jakarta: GemaIslam, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz .*Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid III, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dimyauddin, Djuwani. *Pengantar Muamalah*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010.
- Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haidir, Ali. *Durar al Hukkam Syariah Majalah al-Ahkam*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2007.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2016.

Hukum dalam Fiqh Islam CetKe II (Jakarta: Darul Haq, 2015).

HR Ibnu Majah No. 2139, al-Hakim No. 2142 dan ad-Daraquthni no. 17, dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadist lain yang menguatkannya, dari Abu Sa'id al-Khudriradhi'allaahu 'anhu, HR at-Tirmidzi No. 1290 dan lain-lain. Oleh karena itu hadits dinyatakan baik sanadnya oleh Imam adz-Dzahabidan Syaikh al-Albani (lihat ash-Shalihah No. 3453).

Ja'far Khumedi.A ,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Karnean A, Perataatmadja da Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Bhaki Wakaf, 1992.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenadamedia Group

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhammad dan Kadir Abdul, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, Bandung :Mitra Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Ru'fah, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.

Sahari, Sohari, *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Siti, Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Salim, *Hukum Kontrak Teoridan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika: 2008).

Saqib, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung : Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Grefindo Persada, 2002.

Sutrisno, Hadi. *Etodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Syamil, Mahhtabah dan RaddhulMukhtar, Juz 23, Mauqi Ál-Islami, h 40 www.al-islam.com Aditya Bakti, 2004

Wakhidah, Nurul, *Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Wizarah al-Auqaf al-Miashriyah, 1344 h), [hadiske](#) 11820.

Jurnal

Elisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Iqbal, Muhammad ,*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman*, Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2009.

Meilita, *PraktekJualBeliBarangDenganSistemPanjarTitipDalamPrespektifHukum Islam*, Bandar Lampung: UIN RadenIntan Lampung, 2018.

Saibani, Arman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Wakhidah, Nurul, *Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Sumber Internet

Jual beli *mulasamah* adalah jual beli yang dimana pembeli jika menyentuh barang jualan seseorang itu artiya dia harus membeli dan jual beli ini dilarang syara' (<https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulasamah-jual-beli-munabadzah-jual-beli-hashah-jual-beli-muhaqalah-html>)

Wawancara

Bebby, Pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 10 Juni 2020.

Dian, Pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2020.

Eka, Pembeli bonsai di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 18 Juni 2020.

Lia, Pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2020.

Nurjannah, Pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2020.

Novi, Pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2020.

Oktariani, Pembeli bonsai di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 10 Juni 2020.

Pujianto, Kepala dusun desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2020.

Resti, pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2020.

Rudiyanto, di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 21 Juni 2020.

Rudiyanto, penjual bonsai di desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 10 Juni 2020.

Siti, Pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 18 Juni 2020.

Wati, Pembeli di Desa Sabah Balau, Wawancara pada tanggal 10 Juni 2020.

